



Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---

Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media:	Radar Sampit	Halaman:
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Elektronik	Palangka Post	Tabengan

PENDIDIKAN

Dalami Dugaan Penyelewengan BOS SMA

PALANGKA RAYA-Dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan anggaran komite di SMAN 1 Kapuas Hilir menuai respons dari Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah (Kalteng). Perangkat daerah pemprov yang menaungi sekolah menengah atas (SMA) se-Kalteng ini mengusulkan agar pemeriksaan terhadap dugaan korupsi itu ditindaklanjuti.

"SMAN 1 Kapuas Hilir akan kami usulkan untuk tindak lanjut pemeriksaan lebih dalam," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng M Reza Prabowo kepada Kalteng Pos, Rabu (7/8).

Sebagai wujud tindak lanjut, Reza mengatakan, pihaknya bakal menurunkan pengawas yang bertugas mengawasi sekolah yang dimaksud.

► **Baca: Dalam...Hlm 7**

DALAMI ...

(sambungan dari hlm 1)

Sementara itu, Radiansyah selaku pengawas SMAN 1 Kapuas Hilir mengaku sudah berkoordinasi dan berkomunikasi sejak awal dengan kepala sekolah dan mantan pltk kepala sekolah yang saat ini menjabat wakil kepala sekolah bidang kurikulum di sekolah bersangkutan. "Insyaallah, besok (kemarin, red) saya ke sekolah untuk mendalami masalah ini, hasil pertemuan akan segera saya laporkan," ujarnya.

Sebelumnya, mantan kepala

sekolah SMAN 1 Kapuas Hilir merespons tuduhan korupsi dana BOS dan komite sekolah. Pria bernama Nusantara itu menanggapi statement dari salah satu guru yang menuding ada penyelewengan dana di sekolah yang pernah dipimpinnya itu.

"Saya menjabat Plt Kepala SMAN 1 Kapuas Hilir tahun 2022 dan 2023, saya pastikan tidak ada penyelewengan dana BOS dan BPP, tidak ada skenario dari oknum guru, semua berjalan normal sesuai aturan," tegas Nusantara saat dikonfirmasi Kalteng Pos, Selasa (6/8).

Lebih lanjut Nusantara menjelaskan, tidak semua guru mata pelajaran (mapel) di SMAN 1 Kapuas Hilir diberi dana untuk penunjang kegiatan belajar mengajar. Hanya beberapa mapel saja, disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukan.

“Dan dana itu bukan dipotong untuk kepek, tetapi untuk pajak-pajak dan disetor sesuai dengan jumlah itu, kan tiap pembelian barang ada potongan pajaknya,” kilahnya.

Ihwal perkembangan kasus ini, pelapor atas nama Katina-wung juga sudah melaporkan

kasus ini ke sejumlah lembaga. Persoalan ini sudah ia sampaikan ke Inspektorat di tingkat kabupaten maupun provinsi. Awalnya ia melapor ke Inspektorat Kapuas per tanggal 17 Juli 2024. Kemudian ke Inspektorat Provinsi Kalteng tanggal 24 Juli 2024, dan diterima oleh dua orang staf. “Tetapi Inspektorat masih bungkam sampai saat ini,” ucapnya, Selasa (6/8).

Saat dikonfirmasi Kalteng Pos, Rabu (7/8), Inspektur Daerah Provinsi Kalteng Saring belum memberikan jawaban. “Saya cek dulu laporan masuk,” ujarnya. **(dan/ce/ala)**